

PELAKSANAAN KOORDINASI SATPOL PP DALAM PENERTIBAN PERMAINAN LAYANG-LAYANG TALI KAWAT DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

OKTAVIANUS ARDI
NIM. E01112051

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email : oktavianus_ardi@yahoo.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi koordinasi antar lembaga dalam penertiban permainan layang-layang tali kawat di Kota Pontianak. Judul skripsi ini diambil berdasarkan permasalahan koordinasi antar lembaga terkait dalam penertiban permainan layang-layang tali kawat yang masih belum optimal di kota Pontianak, hal tersebut ditandai dengan banyaknya korban akibat terjerat tali kawat layang-layang dan besarnya wilayah sebaran pemadaman listrik akibat konsleting kabel listrik. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah teori Tripathi dan Reddy. Penelitian dilakukan dengan 3 tahap analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah Satpol PP, TNI Kodam 1207BS, PLN Kota Pontianak dan yang terakhir Polresta Kota Pontianak. Subjek penelitian ini adalah ke-empat instansi yang terlibat koordinasi dalam penertiban permainan layang-layang tali kawat di Kota Pontianak. Kesimpulan penelitian ini belum optimalnya koordinasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kontinuitas yang tidak berjalan, dinamisme yang kurang optimal, perumusan wewenang dan tanggungjawab yang kurang jelas, dan komunikasi yang kurang. Oleh sebab itu rekomendasinya adalah mengoptimalkan kontinuitas, meningkatkan dinamisme, memperjelas perumusan wewenang dan tanggung jawab serta mengoptimalkan komunikasi.

Kata-kata kunci : Pelaksanaan, Koordinasi, Penertiban, Layang-layang Tali kawat

Abstract

This thesis is intended to identify and analyze the factors that affect the inter-institutional coordination in the control of the game kite wire rope in Pontianak. The title of this essay is taken based on problems of coordination among agencies involved in policing the game kite wire rope is still not optimal in Pontianak, it is marked with the number of casualties caused by entangled rope wire kite and the large area distribution of power outages due to short circuit electric wires, this study uses a descriptive study with qualitative approach. The theory used as a knife analysis in this study is the theory Tripathi and Reddy. The study was conducted by three stages of analysis, namely data reduction, data presentation, and conclusion. The location of this research is the municipal police, TNI Military Command 1207BS, PLN and the last Pontianak City Police Pontianak. The subjects were all four agencies involved in the coordination of policing the game kite wire rope in Pontianak. The conclusion of this study is not optimal coordination caused by several factors: the continuity that is not running, the dynamism that is less than optimal, the formulation of authority and responsibility is less clear, and communication is lacking. Therefore, the recommendation is to optimize continuity, increase the dynamism, clarify the authority and responsibility of formulating and optimizing communications.

Keywords: Implementation, Coordination, Control, Kite Wire Rope

A. PENDAHULUAN

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting terutama diantara aparatur pemerintahan dalam era otonomi daerah seperti saat ini, hal tersebut disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintahan.

Keberhasilan pelaksanaan program pada akhirnya ditentukan oleh kerjasama yang baik antara instansi yang terlibat dan disinilah koordinasi antar instansi memegang peran penting. Keseluruhan pelaksanaan pembangunan di daerah harus dikoordinasikan dan dilaksanakan secara serasi dan selaras sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya dan memberikan sumbangan yang nyata dalam tujuan pembangunan

Demikian juga dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak sebagai Daerah Otonom, hal tersebut berdasarkan dibentuknya menjadi Kotapraja dengan status Daerah Otonom Tingkat II sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat, Nomor 3 Tahun 1953 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Untuk dapat tercapainya efisiensi, efektifitas dan produktifitas dari setiap kegiatan pembangunan, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait, bahkan perlu sebuah *TeamWork* yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan khususnya pada

pembangunan daerah yang aman bersih dan kondusif

Koordinasi hanya mungkin menjadi efektif apabila adanya kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-pimpinan organisasi untuk melakukan kerja sama antar instansi ke dalam pelaksanaan kerja di bawah pengarah seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu. Adanya koordinasi yang baik di antara unsur aparatur pemerintah, diharapkan akan lebih terjamin pencapaian tujuan secara keseluruhan

Melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang ketertiban Umum guna mewujudkan suatu kota yang indah, aman, bersih, sehat, tertib, dan tentram, terdapat dalam pasal 22 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang dilarang bermain layang-layang dalam wilayah daerah, kecuali untuk kegiatan festival atau budaya atas izin kepala daerah”, dan ayat (2) yang menyatakan “Kegiatan festival atau budaya yang diizinkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat dan sejenisnya”.

Layang-layang atau kelayangan menurut Kamus Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2008: 892) adalah sebuah mainan yang terbuat dari kertas dan berkerangka yang diterbangkan ke udara dengan memakai tali (benang) sebagai kendali. Layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya sehingga permainan ini hanya mungkin dilakukan saat musim kemarau (tidak hujan); terdapat hembusan angin yang cukup dan berada ditanah lapang, baik anak-anak maupun

orang dewasa saling beradu bermain layang. Sebagai permainan, selain tiga persyaratan di atas, semestinya juga tidak dengan tali kawat atau benang gelas.

Pengamatan peneliti berdasarkan data dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa beberapa kegiatan koordinasi masih belum dilakukan secara terkoordinir, sehingga akibatnya adalah bahwa hasil penertiban menjadi kurang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif. Agar tercapai efisiensi, efektifitas dan produktivitas penertiban, perlu dilakukan suatu studi atau kajian tentang pentingnya koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan dibidang ketertiban umum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut melalui suatu penelitian dengan judul “Koordinasi Dalam Penertiban Permainan Layang-layang Tali kawat di Kota Pontianak” Pemerintah Kota Pontianak melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)merupakan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 mengartikan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum (Tibum) dan ketenteraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2005, bahwa Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

Kedudukan Satpol PP merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggaraan pemerintah di bidang ketertiban dan ketenteraman sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut setiap pimpinan organisasi kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing. Dalam hal tersebut, koordinasi dan

kerjasama yang dilakukan sebagaimana dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 adalah Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya yaitu TNI dalam hal ini sebagai koordinator operasi lapangan yang bertujuan membantu menciptakan ketertiban umum dan stabilitas keamanan di wilayah kota Pontianak.

Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja yang menerapkan prinsip kerja sama dan koordinasi dengan POLRI dan TNI dan PLN Kota Pontianak dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini adalah terkait larangan bermain layang-layang tali kawat di Kota Pontianak harus didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum.

Tetapi berdasarkan pengamatan peneliti koordinasi yang dilakukan oleh aparatur tersebut tidak berjalan optimal karena pada kenyataannya dilapangan tidak semua tim koordinasi tidak mengetahui adanya kegiatan upaya penertiban mulai dari perencanaan, sampai pada pelaksanaan penertiban, hal tersebut menjadi penyebab semakin bertambahnya dampak negatif dari permainan layang-layang seperti korban yang terluka hingga meninggal dunia, serta banyak daerah yang masih rawan akan pemain layangan. Adapun akibat lain yang

disebabkan oleh tali kawat layang-layang adalah gangguan jaringan listrik seperti kabel putus hingga terjadinya pemadaman.

Hal demikian merupakan indikator bahwa pelaksanaan fungsi tata kerja Satpol PP dalam menjalankan tugas pembantuan Kepala Daerah dalam menciptakan kondisi Daerah yang tertib, dan aman dengan prinsip pelaksanaan koordinasi antar aparat penegak perda tersebut masih belum optimal. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan, pada periode bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2013 terdapat 248 jumlah pemain layang tanpa izin dan razia hanya dilakukan sebanyak 2 kali. Sedangkan dari jumlah tersebut adapun yang sudah diproses ke pengadilan sebanyak 11 kasus layangan tanpa izin, dan meningkat pada tahun 2014 sebanyak 14 kasus.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah koordinasi ini berasal dari bahasa Inggris "*Coordination*" yang terdiri dari *co*-dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Organisasi terbentuk dari berbagai macam instansi, dan dengan adanya pembagian tugas pekerjaan dan bagian masing-masing anggota organisasi tersebut, serta unit-unit terkecil di dalam suatu organisasi secara keseluruhan. Koordinasi merupakan suatu usaha dari tujuan organisasi secara keseluruhan.

Koordinasi merupakan suatu usaha dari sekelompok orang dalam mensinergikan suatu

program agar terjadi sesuatu kesamaan pemikiran dan tindakan dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Selain itu koordinasi layaknya sebuah mesin di dalam organisasi, dimana dengan adanya koordinasi sebuah organisasi akan menjadi hidup. Untuk itu koordinasi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Di dalam manajemen, ada beberapa definisi atau konsep tentang koordinasi sebagaimana dikemukakan beberapa ahli berikut ini:

Menurut James.A.F. Stoner dan Charles Wankel (dalam Moekijat 2006), koordinasi adalah proses menyatupadukan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien.

Menurut Siagian, (dalam Moekijat,1994), koordinasi adalah peraturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin. Sedangkan menurut Ensiklopedi Administrasi, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antar badan/instansi/unit dalam pelaksanaan tugas tertentu sedemikian rupa sehingga dapat saling pengertian,saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Hendry Fayol (dalam Sutarto, 2002), mengkoordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan, dan menselaraskan semua kegiatan dan usaha. Dan menurut E.F.L. Brench (dalam *The Principle and Practice of Management* yang dikutip Handyaningrat, 2002), koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa teori yang digunakan dalam penelitian adalah Tripathi dan Reddy (Moekijat 1994:39) ada 9 (Sembilan) syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yakni :

Hubungan langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung di antara orang-orang yang bertanggungjawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham, apabila ada dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijakan. Misalnya, sambil mempersiapkan

rencana itu sendiri harus ada konsultasi bersama. Dengan cara demikian tugas penyesuaian dan penyatuan dalam proses pelaksanaan rencana menjadi lebih mudah.

Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai tahap perencanaan. Oleh karena koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama organisasi melaksanakan fungsinya.

Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan yang baik intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi jangan sampai kaku. Koordinasi ini akan meredakan masalah-masalah apabila timbul koordinasi yang baik sekali akan mengetahui secara dini dan mencegah kejadiannya.

Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu organisasi. Pimpinan harus diberitahu tentang tujuan organisasi dan diminta agar bekerja untuk tujuan bersama perusahaan. Suatu tujuan yang jelas dan diberitahukan secara efektif kepada kepala-kepala bagian dimaksudkan untuk menghasilkan keselarasan tindakan.

Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi di antara kepala-kepala bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan fungsi yang erat berhubungan dapat ditempatkan di bawah beban seseorang pejabat pimpinan apabila hal ini akan mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi.

Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Jelas

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Selanjutnya, wewenang yang jelas membantu pimpinan dalam memelihara orang-orang bawahan bertanggung jawab atas pelanggaran pembatasan-pembatasan.

Komunikasi yang efektif

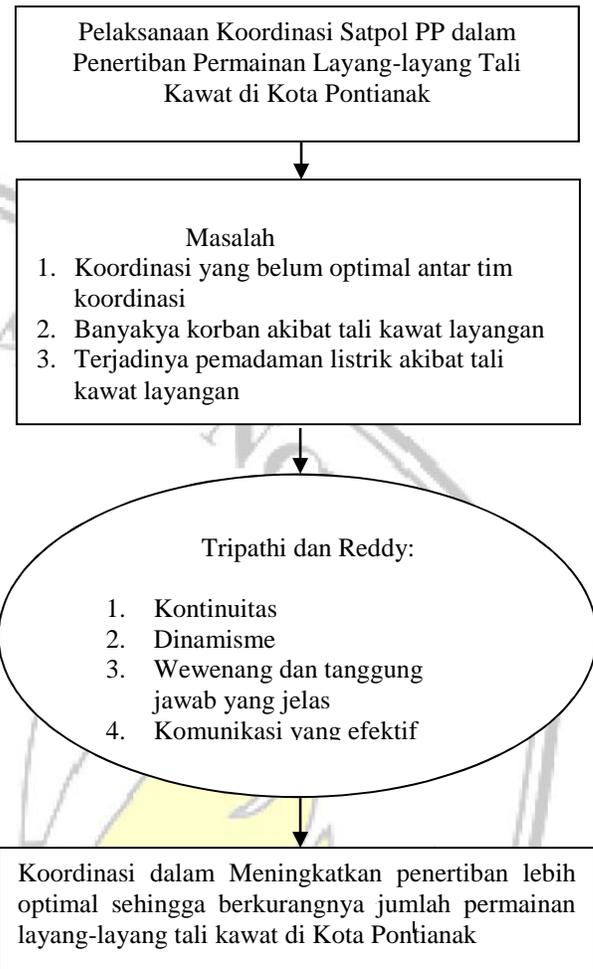
Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik, terjadinya saling tukar informasi secara terus-menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, program-program untuk waktu yang akan datang. Terjadinya komunikasi yang efektif tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan

pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan organisasi dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan keseluruhan staf dapat diarahkan secara harmonis menuju ke pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Kepemimpinan dan supervise yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervise. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Pemimpin yang efektif membuat kepercayaan terhadap orang-orang bawahan dan memelihara juga semangat kerja mereka. Sesungguhnya, kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada metode lain yang menggantikannya.

Gambar 1.1
Kerangka Alur Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggambarkan atau mengungkapkan secara jelas keadaan dilapangan mengenai Koordinasi dalam Penertiban Permainan Layang-layang Tali Kawat di Kota Pontianak. Oleh karena itu jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Nawawi (1998:64) penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagai adanya. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif.

Tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian kualitatif Satori Menurut Komariah (2011:22) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Jangan sampai suatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, koordinasi, masalah-masalah sosial dan tindakan.

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: wawancara, dan dokumentasi. Serta teknis analisis data, peneliti menggunakan olahan pengolahan data melalui analisis data kualitatif.

Tempat atau lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis untuk mengambil lokasi tersebut adalah Adanya

masalah mengenai banyaknya korban dampak permainan layang-layang tali kawat di Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan Tersedianya data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PELAKSANAAN KOORDINASI

1. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Permainan Layang-layang Tali Kawat

Pelaksanaan koordinasi yang efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor, mmenurut Tripathy dan Reddy faktor-faktor yang mempengaruhi ada 9 fdaktor tetapi pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada 4 faktor Karena dirasa lebih relevan dengan objek penelitian yang penulis angkat pada penelitian ini. Pertama mengenai Kontinuitas yang berhubungan dengan kenerlanjutan koordinasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pariata (dalam Moekijat, 1994:55) di mana koordinasi lebih disiapkan sejak tahap-tahap pemulaan kegiatan atau program yang bersangkutan dan kemudian dipertahankan sebagai proses yang terus menerus sehingga dipahami suatu koordinasi yang efektif adalah koordinasi yang berkelanjutan, yang kedua adalah dinamisme

Peneliti telah mengemukakan masalah tentang koordinasi dalam penertiban permainan layang-layang tali kawat di Kota Pontianak, peneliti menemukan fenomena-fenomena

mengenai koordinasi yang berjalan tidak optimal. Untuk itu dalam mendalami masalah ini dan menemukan kebenaran akan fakta fakta fenomena yang terjadi di lapangan maka peneliti melaksanakan penelitian. Penelitian ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan data berupa data tertulis dan pendalaman masalah dengan wawancara.

Koordinasi adalah sebuah kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Koordinasi tergantung pada kemampuan dalam menyelaraskan, mensikronkan, mensejajarkan antara sesuatu kegiatan dengan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dengan instansi-instansi terkait untuk mencapai tujuan yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu mengenai koordinasi yang efektif dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dengan PLN Kota Pontianak, Polresta Kota Pontianak, dan TNI. Pelaksanaan koordinasi pemerintahan yang efektif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Tripathy dan Reddy faktor-faktor yang mempengaruhi ada 9 (Sembilan) faktor namun pada penelitian ini peneliti lebih menekankan pada 4 (empat) faktor yang sesuai dengan objek penelitian yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

Dalam pelaksanaan koordinasi memiliki beberapa sifat yang perlu diperhatikan. Pertama kontinuitas, dikarenakan koordinasi merupakan keberlangsungan atau proses kontinu mendasar struktur organisasi dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua adalah dinamsme

koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan yang baik intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi jangan sampai kaku. Ketiga adalah perumusan wewenang dan tanggungjawab, kurangnya koordinasi dalam suatu organisasi dapat dilihat dari saling pelemparan tanggungjawab karena masing-masing merasa bahwa suatu wewenang tidak termasuk dalam lingkupnya. Faktor perumusan wewenang dan tanggungjawab ini memudahkan untuk pencapaian koedinas yang efektif karena dengan adanya perumusan wewenang dan tanggungjawab yang jelas dapat mencegah tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab . faktor kelima yaitu kominkasi yang ektif untuk mempermudah koordinasi melalui saling tukar informasi secara terus menerus dan menyesuaikan dengan perkembangan program untuk waktu yang akan datang.

1. **Kontinuitas**

Kordinasi merupakan suatu proses yang kontinu atau berkeninambungan, tidak hanya berhenti pada saat tahap awencanaan saja awal perencanaan saja dan merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu koordinasi harus dilakukan terus menerus agar pelaksanaan koordinasi yang efektif yang hemdak dicapai dapat diwujudkan

Masalah permainan layang-layang tali kawat adalah salah satu permasalahan ketertiban umum Kota Pontianak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Satuan Polisi Pamong

Praja sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi. Dengan tahapan-tahapan tersebut, maka koordinasi yang dilakukan harus merupakan sebuah proses yang berjalan terus menerus dalam arti lain proses yang sifatnya berkesinambungan dalam rangka tercapainya ketertiban dan ketenangan bebas dari masalah tali kawat. Hal ini tidak lepas dari dengan fungsi yang harus dijalankan masing-masing tim . apabila tim menjalankan fungsinya dengan baik, maka koordinasi yang dilakukan akan berkesinambungan.

Tanggapan Kepala bagian P3 berkaitan dengan kontinuitas koordinasi yang ada antara Satpol PP dengan instansi yang terkait dalam mengatasi dan mengurangi permainan layangan tali kawat, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak bapak Sumardi selaku pengkoordinator pelaksana ketertiban pada hari senin 18 januari 2016 pukul 10.25 Wib di sekretariat Satpol PP Kota Pontianak, beliau mengatakan bahwa:

“koordinasi dalam penertiban permainan layang-layang selama ini berjalan baik, mulai pada tahap awal yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. dalam setiap tahapan kita sebaga pengkoordinator selalu memberitahukan kepada masing-masing instansi terkait mengenai perkembangan

permainan layang-layang melewati rapat yang ada”

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Ruslan E bahwa :

“Koordinasi atau rapat bersama yang dilakukan hanya sebatas pada tahap awal perencanaan saja, hampir tidak pernah untuk berkonsultasi lagi pada tahap pelaksanaan apalagi tahap evalusimya”

Pernyataan di atas didukung juga oleh Kasat Binmas Polresta Kota Pontianak Kumpul Salbiah dalam wawancara pada hari senin tanggal 25 januari 2016 pukul 11.00 Wib diruang kerjanya, beliau mengatakan sebagai berikut :

“Satpol PP pernah kok menghubungi kami mengenai permasalahan penertiban layang-layang tali kawat, tapi kerjasama kami hanya diadakan apabila ada isu-isu atau permasalahan dilapangan muncul, terakhirnya ada kerjasama pada tahun 2013 sampai 2014 untuk tahun 2015 tidak ada lagi”

Melalui pernyataan beliau sebagai salah satu aparatur yang menangani masalah layang-layang tali kawat di Polresta Kota Pontianak, menunjukkan bahwa terjadinya kontinuitas di dalam penertiban layang-layang tali kawat. Terjadinya koordinasi yang terus menerus memberikan dampak positif. Dampak positif tersebut bisa terlihat melalui penyebaran informasi yang sampai kepada instansi kepada instansi terkait secara tepat waktu sehingga instansi tersebut tidak ketinggalan informasi mengenai permasalahan layang-layang tali kawat.

Tetapi pendapat berbeda diungkapkan oleh staff operasi dan distribusi PLN Kota Pontianak. Bapak Luffi selaku instansi yang terkait dalam penanganan layang-layang tali kawat pada wawancara pada hari Rabu 13 Desember 2015 pukul 09.00 WIB diruang kerjanya beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kami tidak mengetahui apakah ada kerjasama dalam penanganan permainan layang-layang itu, tapi kami sudah memberikan himbauan kepada masyarakat supaya tidak bermain layang-layang menggunakan tali kawat/gelasan apalagi dekat dengan kabel jaringan listrik karna akan mengakibatkan gangguan bahkan sampai membahayakan nyawa, masalah penertibannya kami tidak terlibat dalam tahap pelaksanaan penertiban dilapangan”

Melihat pernyataan beliau, dapat digambarkan bahwa kontinuitas tidak terjadi di instansi PLN Kota Pontianak. Kurangnya informasi mengenai pelaksanaan koordinasi menyebabkan instansi tidak begitu peduli dan mengerti terhadap kesinambungan kerjasama dalam menertibkan layang-layang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa kontinuitas koordinasi dalam pelaksanaan penertiban layang-layang tali kawat sudah berjalan cukup baik pada instansi tertentu namun masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahapan awal sampai akhir tidak semua tim mengetahui apakah ada kerjasama selama ini dalam menertibkan layang-layang tali kawat dan masih belum merasakan kontinuitas dalam koordinasi pelaksanaan penertiban. Satpol PP sebagai pengkoordinator selalu memberitahukan tetapi tidak kepada semua tim yang ada.

2. Dinamisme

Dinamisme merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam tim pelaksana koordinasi penertiban permainan layang-layang tali kawat. Dinamisme berhubungan erat dengan kinerja organisasi dalam hal ini adalah koordinasi harus secara terus-menerus dilakukan oleh setiap instansi yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tujuan sebuah organisasi mengingat perubahan-perubahan lingkungan yang baik intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi jangan sampai kaku, koordinasi ini akan meredakan masalah-masalah apabila timbul dinamisme dalam koordinasi maka akan dapat mengetahui secara dini dan mencegah masalah-masalah yang terjadi.

3. Wewenang dan Tanggungjawab yang jelas

Perumusan wewenang dan tanggungjawab yang jelas merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam koordinasi penertiban permainan layang-layang tali kawat. Perumusan wewenang dan tanggungjawab yang jelas berhubungan erat dengan struktur organisasi, hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi harus menggambarkan penjabaran dari fungsi-fungsi tugas pokoknya. Oleh karena itu diperlukan penjabaran wewenang yang mengatur koordinasi antar tim yang melaksanakan penertiban layang-layang tali kawat. Tanpa wewenang tim tersebut

dalam organisasi tidak dapat mengetahui apa tugas masing-masing, ini membantu agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang.

Pengertian dari tanggungjawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggungjawab tercipta karena adanya penerimaan wewenang, oleh karena itu harus ada keterkaitan antara satu sama lain dan antara wewenang dan tanggung jawab. Perumusan wewenang dan tanggungjawab ini dapat dilihat pada tugas, fungsi serta wewenang masing-masing jabatan. Tujuan dari perumusan wewenang dan tanggungjawab adalah untuk mengetahui kedudukan suatu jabatan, ruang lingkup kerja unit organisasi, penanggungjawaban dari suatu jabatan sertakewenangan dan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab dari suatu jabatan.

Menurut jenis koordinasi yang dikatakan Suganda (1998) penelitian ini juga termasuk koordinasi eksternal yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi. Hal ini ada kaitanya dengan tim pelaksanaan penertiban yang dibentuk berdasarkan perda Kota Pontianak no 1 tahun 2005 tentang pembentukan Satpol PP. Sebagai contoh jenis koordinasi yang terjalin antara Satpol PP, TNI, POLRESTA, dan PLN Kota Pontianak. Seperti yang disampaikan oleh Supriadi (49) pada hari Selasa 19 Januari 2016 pukul 10.00 WIB di Sekretariat Satpol PP Kota

Pontianak, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Penertiban layang-layang ini merupakan komitmen bersama yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintahan di Kota Pontianak. Hal ini merupakan kesadaran dan pemahaman masing-masing instansinya, sejauh ini Satpol PP sudah berusaha menjalankan tugas dan wewenang sebagai pengkoordinator dengan seoptimal mungkin”

Hal yang didapati di lapangan adalah bahwa masih ada pejabat yang bahkan tidak mengetahui bahwa instansinya ikut serta dalam tim penanganan masalah tali layang-layang yang mengganggu jaringan distribusi PLN. Sehingga ketika melakukan wawancara, peneliti diarahkan kepada bidang yang lainnya. Daru penuturan di atas sudah terjadi pelemparan wewenang dan tanggungjawab. Pendapat lain disampaikan oleh Kasdim TNI Kota Pontianak, pada wawancara pada hari Senin Januari 2016 di ruang tamu Sekretariat Kodim/1207/BS, beliau mengatakan bahwa:

“Kita sampai saat ini masih belum pernah berkumpul secara khusus untuk membahas tentang upaya penertiban layang-layang, dan tahun lalu pernah ada surat dari Satpol PP untuk rapat masalah tibum, tapi bukan membicarakan tentang layang-layang yang dibahas adalah penertiban PKL.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa selama ini tidak ada kejelasan tanggungjawab yang diberikan oleh Satpol PP secara khusus kepada salah satu instansi yang ikut menangani penertiban layang-layang tali kawat. dan faktor perumusan wewenang dan tanggungjawab yang jelas mempengaruhi terlaksananya suatu pelaksanaan koordinasi yang diharapkan.

Wewenang dan tanggungjawab masing-masing instansi atau bagian tidaklah sama oleh karena itu wewenang dan tanggungjawab yang jelas mengurangi pertentangan atau perbedaan paham dari pihak lain membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga apabila dengan mengetahui wewenang dan tanggungjawab yang jelas akan memudahkan untuk menyatupadukan atau menyelaraskan tindakan dari masing-masing pihak yang berlainan paham atau pendapat. Selain itu juga terjadi inisiatif yang baik dari salah satu instansi untuk melakukan inovasi dalam pengembangan pelaksanaan penertiban sehingga menjalin koordinasi dengan baik sesuai tugas dan wewenang dari masing-masing instansi.

4. Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu syarat untuk koordinasi yang baik, melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatai dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program untuk waktu yang akan datang. Komunikasi pada dasarnya adalah penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari si pengirim pesan kepada sang penerima pesan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tripathi dan Reddy (dalam, Moekijat,1994:40) bahwa ada lima komponen dasar komunikasi yaitu : pengirim pesan, pesan, saluran;penerima pesan dan umpan balik (feedback). Dengan adanya keselarasan dari lima

komponen komunikasi tersebut maka terwujud komunikasi yang efektif.

Selain itu, komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Menurut Tripathi dan Reddy, komunikasi juga sangat menentukan dalam keberhasilan koordinasi suatu program. Dengan komunikasi, manusia dapat saling berhubungan dengan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Koordinasi dalam sebuah program yang direncanakan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari komunikasi. Tanpa komunikasi yang diatur secara baik, maka tidak mungkin koordinasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil dan begitu juga sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet atau berantakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada wawancara peneliti dengan Kasat Binmas Polresta Kota Pontianak, pada hari Kamis Januari 2016 beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau berbicara komunikasi, selama ini kami tetap berhubungan dengan Satpol PP baik via telpon, maupun bertemu langsung itu pun kalau ada surat undangan rapat, dan rapat koordinasi selama ini tidak di fokuskan pada permasalahan layang-layang tali kawat, menurut saya kalau salah

salah satu cara dalam menangani masalah tali kawat layangan adalah Satpol PP dengan pihak PLN sesering mungkin mengadakan sosialisasi terkhusus dan tidak mengenal musim terkait bahaya tali kawat layangan, fakta selama ini sosialisasi dari PLN hanya bersifat kuratif.

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa kurangnya komunikasi yang terjalin antara Satpol PP sebagai pengkoordinator dan tim-tim yang terkait. Menimbang bahwa instansi-instansi yang terlibat di dalam tim juga memiliki tugas masing-masing jadi perlunya peran aktif Satpol PP untuk mensosialisasikan agar lebih terjalin komunikasi yang baik. Dapat disimpulkan bahwa benar adanya jika dalam suatu proses pelaksanaan program yang tidak melakukan komunikasi dengan baik maka akan sulit mencapai hasil koordinasi yang baik.

2. Pelaksanaan Koordinasi dalam penertiban permainan layang-layang tali kawat di Kota Pontianak

a) Perencanaan

Perencanaan adalah keputusan yang akan dikerjakan waktu yang akan datang. Perencanaan dimaksudkan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang akan dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai indikator melakukan

membuat perencanaan, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kasat Kota Pontianak, pada hari Kamis Januari 2016 beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Pada dasarnya setiap program kegiatan memang perlu dilakukan sebuah perencanaan, kam dari Satpol PP sendiri sudah menentukan dan memutuskan siapa yang terlibat dalam penertiban layang-layang, kapan dan dimana kita akan lakukan operasi. Semuanya sudah jelas. Tapi kadang tidak semua tim koordinasi yang bisa memahami apa sesungguhnya tujuan kita. Mereka hanya sebatas menjalankan tugas menertibkan tidak ada upaya memikirkan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, belum ada perencanaan yang dibuat secara terstruktur, ketiga instansi yang terkait tersebut hanya menjalankan apa yang sudah dijelaskan saat rapat awal dibuatnya MOU. Seharusnya tim pelaksana penertiban membuat perencanaan yang jelas, yang bisa nantinya digunakan untuk periode jangka panjang. Dari perencanaan tersebut, akan terlihat hal apa saja yang sudah ditetapkan dan akan dicapai. Perencanaan juga berguna sebagai standar tolak ukur para tim dalam melakukan kegiatan, sehingga ada pedoman yang dipegang, dan apabila terjadi penyimpangan atau keluar dari rencana, bisa diluruskan kembali dengan berpegang pada standar tersebut.

b) Komunikasi

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian. Sehingga informasi dapat dipahami oleh pihak kedua pihak, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik. Sebagai suatu proses penyampaian informasi, individu yang terlibat dalam kegiatan komunikasi khususnya komunikator perlu merancang dan menyajikan informasi yang benar dan tepat sesuai *setting* informasi, lalu informasi tersebut disajikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi dan tingkat penerima lawan komunikasi

Dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa komunikasi yang bersifat umpan balik antara sesama tim koordinator dan yang dikoordinir belum jelas. terdapat tumpang tindih atau saling melempar tanggung jawab diantara pihak Satpol PP. Pelaksanaan komunikasi memang sudah dijalankan, tetapi belum optimal, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Kepala bagian P3 Satpol PP Kota Pontianak hanya menerima laporan saja, tanpa adanya hubungan timbal balik komunikasi yang jelas dari tim koordinasi misalnya beliau mengatakan PLN seharusnya dalam memberi laporan perlu

dilakukan evaluasi setiap bulannya karena dampak dari permainan layang-layang itu langsung pada efektivitas listrik terangnya.

Kondisi ini yang membuat penyampaian informasi kurang maksimal karena tidak dilakukan pertemuan langsung melainkan hanya melalui *handphone*. Sebaiknya pihak koordinator dan yang dikoordinir melakukan pertemuan, karena penyampaian komunikasi secara langsung bisa lebih memudahkan para anggota dalam menyampaikan ide-ide dan saran dalam pembuatan rencana dan target kegiatan.

c) Pembagian kerja

Pembagian tugas timbul dikarenakan seseorang untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh karena itu pembagian tugas berarti pengkhususan yang dipertimbangkan antara lain: perincian tugas, pengadaan dan penempatan pegawai, kewajiban dan tanggung jawab agar terdapat efisiensi dalam menggunakan tenaga atau antara instansi –instansi yang terkait dengan saling bekerja sama.

Bentuk tanggung jawab yang dibebankan dalam pelaksanaan penertiban layang-layang sudah diketahui masing-masing pihak. Yakni, Satbinmas Polresta Kota Pontianak, PLN dan Kodim 1207/ BS Pontianak bertanggung jawab sebagai koordinator dan berkoordinasi dengan Satpol PP, dimana tugas tim adalah

melakukan hubungan koordinasi dengan Satpol PP dalam bentuk pengambilan keputusan untuk melakukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan pelaksana penertiban layang-layang tersebut. Dari wawancara yang dilakukan, dan informasi yang didapatkan dari pihak terkait, Satpol PP sudah melaksanakan tanggung jawab mereka dengan optimal.

Fakta ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan penertiban dengan lancar dan setiap anggota penertiban yang dipilih sudah menjalankan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada mereka. Hal ini nantinya tentu akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas mereka, yakni menertibkan para pemain layang-layang, keberhasilan pelaksanaan tugas dari para tim penertiban akan ditentukan dari pendelegasian tugas yang tepat dan tingginya rasa tanggung jawab kerja yang ditunjukkan oleh tim tersebut. Untuk itu dalam meningkatkan tanggung jawab kerja yang tinggi, penanggung jawab tim implementor penertiban memberikan otonomi kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada masing-masing pihak.

Koordinasi berhubungan dengan tugas menyatupadukan kegiatan-kegiatan guna menjamin suksesnya pencapaian tujuan di dalam suatu organisasi, tak terkecuali pada organisasi satpol PP. Koordinasi antara satpol

PP dengan Polresta, TNI, dan PLN merupakan koordinasi fungsional atau koordinasi horisontal, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang di koordinasikan memiliki kedudukan yang sejajar antara pihak satpol PP. Menurut tugas dan fungsinya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi. Kebutuhan akan koordinasi antara satpol PP, Polresta, TNI, PLN timbul karena adanya tugas dan fungsi yang sama dalam penertiban layang-layang tali kawat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antara Satpol PP, Polresta, TNI, dan PLN belum optimal karena dipengaruhi beberapa faktor yang dijelaskan pada subab sebelumnya. Dimana komunikasi mempengaruhi pelaksanaan koordinasi, kontinuitas, dinamisme, wewenang dan tanggungjawab, serta komunikasi yang efektif adalah kunci dari pelaksanaan koordinasi yang efektif.

Dilihat dari sudut pandangan kontinuitas, koordinasi yang dilakukan antara Satpol PP, dengan PLN, Polresta, dan TNI masih sebatas pada tahap awal perencanaan saja, padahal suatu pelaksanaan yang efektif itu adalah koordinasi yang kontinu atau berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi, dapat di pahami bahwa koordinasi antara Satpol PP, dan TNI, Polresta, PLN masih kurang efektif.

Pelaksanaan koordinasi dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa kriteria, Abdurachman (dalam Moekijat, 1994:37) di mana di jelaskan koordinasi yang efektif itu memenuhi prinsip konvergensi, dimaksudkan adalah koordinasi yang efektif menuntut adanya suatu kesatuan arah dan tingkat agar diperoleh suatu keselarasan dalam mencapai tujuan bersama, *common poupose*, dimana pada hakiatnya tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan arah tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada setiap individu/unit agar ikut melaksanakan tujuan bersama, *esprit de corps*, artinya setiap bagian/unit yang melakukan koordinasi harus menyadari akan fungsi mereka dan dituntut agar satu sama lain adanya sikap saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing.

Dilihat dari criteria mengenai suatu pelaksanaan koordinasi yang efektif dapat di pahami koordinasi antara Satpol PP, dan instansi terkait masih belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dalam proses koordinasi yang dilakukan bahwa sangat sulit untuk melakukan koordinasi disebabkan salah satunya adalah instansi terkait tidak menanggapi dengan serius karena kesibukan lain di luar jabatan masing-masing, jika sudah menjelang pelaksanaan penertiban langsung kelapangan barulah dilakukan suatu rapat, bagaimana bisa menyatupadukan pendapat

dari masing-masing pihak yang melakukan koordinasi jika tidak ada komunikasi dan perumusan wewenang yang jelas dari atasan atau bahkan pertemuan langsung untuk membahas fungsi bersama dalam menyusun dan menetapkan tugas dan tanggungjawab dari setiap instansi yang terlibat. Pelaksanaan kordinasi antara Satpol PP,TNI,Porlesta,dan PLN menjadi kurang efekti disebabkan pula oleh kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi bersama dari Satpol PP dan instansi terkait.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada koordinasi Dalam meningkatkan Program penertiban layang-layang tali kawat di Kota Pontianak. Peneliti menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi, adapun simpulan tersebut sebagai berikut:

1. Kontinuitas

Bahwa kontinuitas koordinasi dalam pelaksanaan program penertiban layang-layang tali kawat belum berjalan secara optimal dikarenakan dari setiap tahapan Satpol PP sebaga koordinator tidak memberitahu secara menyeluruh kepada smua tim pelaksana penertiban layang-layang tali kawat sehingga masih ada anggota kerjasama yang tidak mengetahui perkembangan tahapan penertiban layang-layang tali kawat di Kota Pontianak.

2. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan yang baik intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi jangan sampai kaku. Koordinasi ini akan meredakan masalah-masalah apabila timbul koordinasi yang baik sekali akan mengetahui secara dini dan mencegah kejadiannya.

3. Perumusan wewenang dan tanggungjawab

Bahwa anggota tim pelaksana penertiban layang-layang tali kawat di Pontianak belum menerapkan dengan baik tugas dan fungsinya masing-masing sehingga faktor perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas menjadi faktor yang mempengaruhi suatu koordinasi yang efektif. Anggota tim pelaksana penertiban layang-layang tali kawat hanya mengetahui lebih lanjut dikarenakan sikap acuh tak acuh juga dan masih memikirkan tugas pokok yang lebih penting dari program penertiban layang-layang tali kawat. Anggota tim pelaksana penertiban layang-layang tali kawat hanya mengetahui secara umum wewenang dan tanggungjawab mereka tanpa ingin mengetahui lebih lanjut dikarenakan sikap acuh tak acuh juga dan masih memikirkan tugas pokok yang lebih penting dari penertiban layang-layang tali kawat.

4. Komunikasi yang efektif

Bahwa kurangnya komunikasi yang antara Satpol PP sebagai koordinasi dan anggota kerjasama yang terkait di dalam program penertiban layang-layang tali kawat. Menimbang bahwa instansi yang terlibat didalam tim juga memiliki tugas masing-masing jadi perlunya peran proaktif Satpol PP Kota Pontianak sebagai *leadingsector* yang bertanggung jawab.

F. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang didapat oleh peneliti, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kontinuitas

Perlu adanya koordinasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu yang dilewati seperti mengadakan suatu pertemuan khusus secara rutin dengan membalas tentang penertiban layang-layang tali kawat sehingga baik dari koordinator dan tim pelaksana penertiban layang-layang tali kawat dapat dengan mudah mengetahui perkembangan dari tahapan-tahapan yang mudah di lalui penertiban layang-layang tali kawat.

2. Dinamisme

Satpol PP seharusnya lebih tanggap dan dinamis dalam membuat keputusan dan jadwal pelaksanaan penertiban, sehingga adanya prinsip pencegahan terjadinya

masalah layang-layang, tidak hanya melihat sudah terjadi baru ada upaya penertiban.

3. Perumusan wewenang dan tanggungjawab
Hendaknya ada rapat kerja yang membahas mengenai wewenang dan fungsi dari instansi terkait agar aparatur atau staf yang menangani penertiban layang-layang tali kawat lebih memahami dan dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berlaku. Melakukan monitoring dalam melaksanakan tugas masing-masing apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan harus melakukan evaluasi dalam setiap melakukan kegiatan koordinasi sehingga dapat menemukan kekurangan dan kesalahan yang terjadi.
4. Komunikasi yang efektif
Perlunya diadakan sosialisasi rutin baik kepada masyarakat, maupun kepada sesama tim yang menjalankan tugas sehingga hubungan kerja antar instansi lebih terjalin erat. Dan pada akhirnya harus dilakukan evaluasi rutin (forum koordinasi) untuk membahas mengenai perkembangan program ketertiban.

1. Keterbatasan Penelitian

Sebagai sebuah laporan penelitian pastinya peneliti mengalami keterbatasan dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. Maka dari itu peneliti masih merasa bahwa laporan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Banyak hal yang menjadi faktor penghambat didalam penyelesaian laporan

ini. Seperti salah satunya adalah luasnya permasalahan yang ada sehingga peneliti hanya bisa mampu menyelesaikan dan mengkaji permasalahan yang telah dijelaskan diatas. Yang kedua menjadi faktor penghambat adalah terbatasnya ruang dan waktu serta materi untuk dapat menyempurnakan penelitian ini

Meskipun laporan ini masih banyak keterbatasan dan kekurangan yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu oleh peneliti, peneliti berharap kekurangan serta keterbatasan dalam proses penyusunan laporan akhir penelitian ini dapat disempurnakan oleh penelitian lain yang akan datang.

G. REFERENSI

- Daryanto, S.S.1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: APOLO.
- Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung
- Hasibuan, Melayu S.P, 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara
- H.B Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya : Sebelas Maret Press
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Koordinasi dan Hubungan kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lexy J Moleong. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.

Miles, Matthew B dan huberman, A Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Universitas Indonesia Press

<http://pontianak.tribunnews.com/2016/06/07/terliti-tali-layanan-seorang-warga-pontianak-timur-tewas-tersengat-listrik> Diakses tanggal 08/06/2016 pukul 09:13

Mulyana Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung:RosdaKarya.

<http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>Diakses 4/12/2015 pukul: 01:21

.....2006. Komunikasi Organisasi. Bandung: Rosda karya.

<http://pontianak.tribunnews.com/2014/03/07/hentikan-teror-layang-layang>. Diakses 25/9/2015

Moekijat. 1994. Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis). Bandung: Mandar Maju.

Nawawi, Hadari. 1995. Metode penelitian sosial. Yogyakarta: Gajahmada

Sugiyono, 2003. metode penelitian administrasi. Bandung: Alfabeta

Sugandha, Dann. 1998. Koordinasi, Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta: Intermedia

Sutarto. 2002. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Gajah Mada University

Dokumen:

Peraturan Pemerintah RI No.06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Pontianak No 01 Tahun 2005 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Pontianak No.15 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Pontianak No.1 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Internet:

Pontianak. Tribunnews.com



KEMENTERIAN RIKE TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Oktavianus Ardi
 NIM / Periode lulus : E.01112051 / IV
 Tanggal Lulus : 21 - Juni - 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : ardi.octavianus@yahoo.co.id / 0853-8785-6403

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi IAN Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Pelaksanaan Koordinasi Satpol PP dalam Penertiban Permainan Layang - Layang Tali Kawat di Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

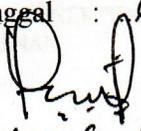
- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


 Disetujui
 Pengelola Jurnal
 Dr. Pardi M. AB
 NIP. 197209052002121003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 6 Desember 2018

 Oktavianus Ardi
 NIM. E0112051

Catatan :
 *tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)